

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa peran yang dilaksanakan Diskominfo DIY terkait penanggulangan pornografi di DIY maka dapat diketahui bahwa peran sebagai tokoh, peran sebagai pejabat perantara dan peran sebagai pusat informasi dijalankan dengan baik oleh Diskominfo DIY. Namun dalam perannya sebagai pemimpin, peran sebagai pemantau, peran sebagai *disseminator*, peran sebagai juru bicara, peran sebagai otoritas formal dan peran sebagai pengambilan keputusan-keputusan strategis masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan pada setiap program yang dijalankan oleh peran-peran tersebut terdapat kekurangan dan keluaran yang tidak memuaskan sehingga perannya dalam melaksanakan program tersebut tidak maksimal. Peran-peran tersebut meliputi:

- a. Peran sebagai pemimpin, dalam perannya sebagai pemimpin yang ditunjukkan pada pengadaan sertifikasi teknologi, informasi dan komunikasi masih dirasa kurang optimal. Hal itu dikarenakan untuk melaksanakan pengawasan seluruh wilayah DIY diperlukan kemampuan penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi yang tinggi, namun sertifikasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo DIY hanya sertifikasi dasar mengenai penggunaan internet dan komputer.

- b. Peran sebagai pemantau, dalam peran ini terdapat keterikatan dengan peran Diskominfo sebagai pemimpin dalam melaksanakan sertifikasi teknologi kepada pegawainya, dimana Diskominfo tidak dapat melaksanakan pemantauan secara menyeluruh di DIY dikarenakan terhambat kemampuan dari staff atau pegawai Diskominfo sendiri yang kurang dalam melakukan pemantauan dalam menanggulangi pornografi.
- c. Peran sebagai disseminator, dalam peran ini kurang optimalnya penyebaran informasi di DIY mengenai pornografi adalah karena tidak dilaksanakannya sosialisasi dampak beredarnya pornografi di DIY. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang membiarkan peredaran itu terjadi dan bahkan menikmati sendiri hal tersebut tidak menyadari bahwa dampak pembiaran situs pornografi tidak hanya akan berpengaruh pada diri sendiri tetapi juga orang lain terutama anak-anak pada zaman teknologi saat ini. Sehingga Diskominfo perlu menyadarkan masyarakat DIY akan bahaya dan pentingnya melapor atas penemuan situs pornografi di DIY.
- d. Peran sebagai juru bicara, dalam peran ini hal yang tidak berjalan dengan baik adalah keluaran yang diharapkan saat melaksanakan bimbingan teknis internet sehat kepada masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan ditangkapnya prostitusi online yang menggunakan gambar dan video porno oleh seorang

mucikari yang adalah seorang mahasiswa yang juga menyediakan jasa prostitusi mahasiswi.

- e. Peran sebagai otoritas formal, dalam peran ini hal yang tidak berjalan dengan baik adalah kegiatan dalam pendekatan riset kriminologi dimana pendekatan ini diperlukan untuk meneliti kasus serupa yang terjadi sehingga dapat memaksimalkan pembuatan program terkait penanggulangan pornografi. Oleh karena tidak dilaksanakannya riset kriminologi tersebut menyebabkan program seperti program sertifikasi dasar teknologi pegawai menjadi tidak maksimal karena tidak dapat mengimbangi penyebaran pornografi di DIY yang membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi yang tinggi.
- f. Peran sebagai pengambilan keputusan-keputusan strategis, dalam peran ini terdapat strategi-strategi yang tidak berjalan baik dimana strategi perubahan perilaku kejahatan tidak dilaksanakan padahal strategi tersebut penting dalam mengubah pelaku agar tidak mengulang kembali kejahatannya karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut terulang kembali.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pornografi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017, maka saran yang dapat diberikan adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika DIY diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam upaya monitoring kasus penyebaran pornografi di DIY dan mengajukan kepada pemerintah daerah DIY untuk membuat regulasi anti pornografi di DIY serta menciptakan beberapa strategi dan kebijakan yang handal dalam mencegah penyebaran pornografi di DIY.